



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tuanku Tambusai-Bagan Besar Telp. (0765) 440414 Fax. 440415
DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI

NOMOR **27** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan kualitas dan kinerja yang terukur dalam pelayanan publik, perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 28 Seri E).
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dasar dan pedoman dan menjadi dasar dan pedoman untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n WALIKOTA DUMAI

KEPALA,



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740213 199303 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai

Nomor : 27 Tahun 2024

Tanggal : 31 Januari 2024

I. MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	1. Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	BAPPEDA

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740213 199303 1 002

Lampiran II Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

Nomor : **27** Tahun 2024

Tanggal : **31** Januari 2024

II. PROSES DAN SUB PROSES BISNIS

PROSES BISNIS/Sasaran		SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)		OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2		3		4
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode		
BPD 01	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	BPD 01.01	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang memiliki sinergi, berkualitas dan terhubung dengan perencanaan kinerja	BPD 01.01.01	Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat	BAPPEDA
				BPD 01.01.02	Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan guna meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah	
				BPD 01.01.03	Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang ditetapkan	
BPD 02	Meningkatkan kualitas SDM Perencana Bappeda	BPD 02.01	Mewujudkan Perencana yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	BPD 02.01.01	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	

PROSES BISNIS/Sasaran		SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)		OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2		3		4
				BPD 02.01.02	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Perencana	
				BPD 02.01.03	Peningkatan kesehatan Jasmani dan Rohani Perencana	
BPD 03	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di lingkungan Bappeda	BPD 03.01	Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja di Bappedalitbang	BPD 03.01.01	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	
				BPD 03.01.02	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	
				BPD 03.01.03	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

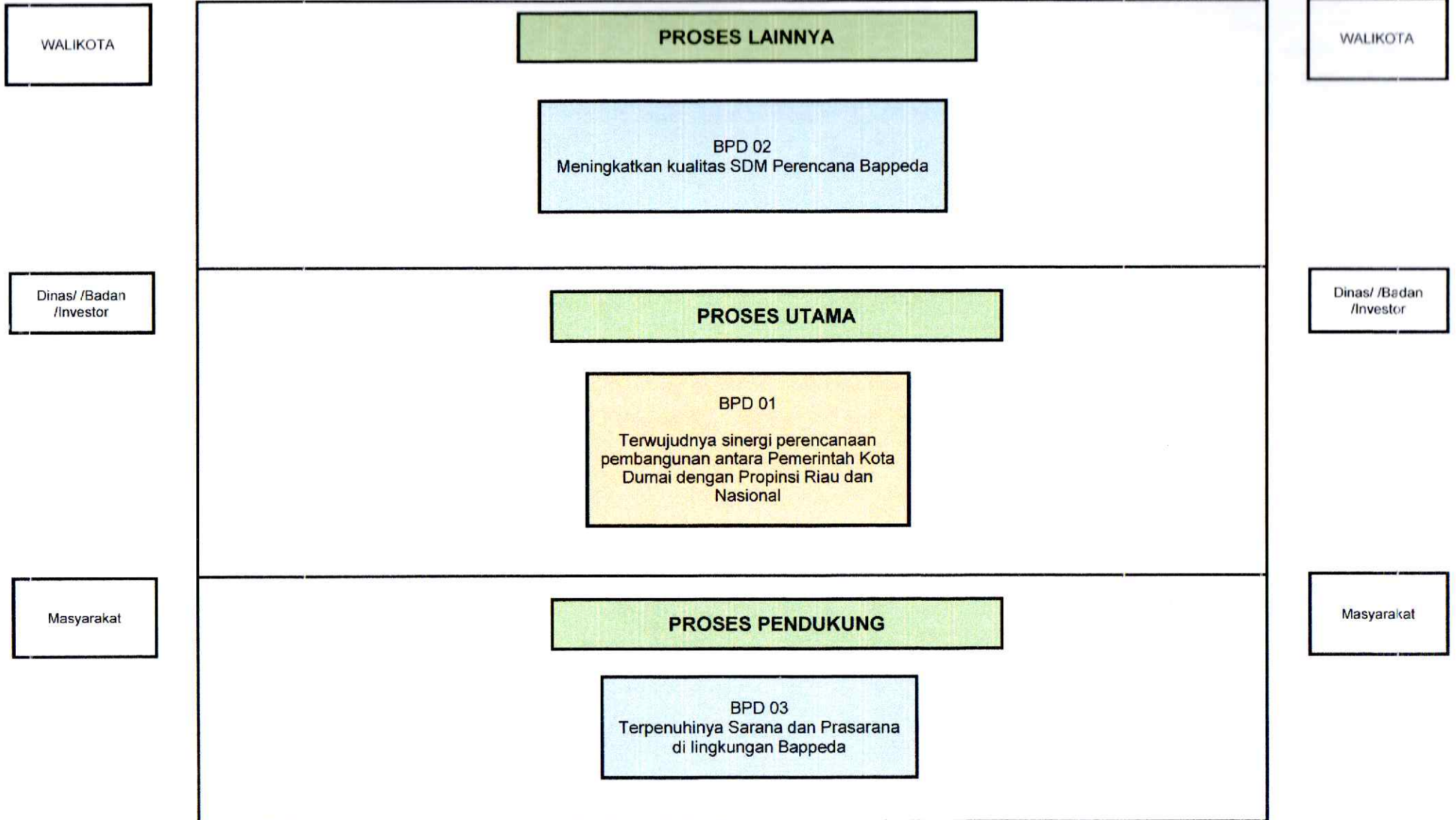


Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740213 199303 1 002

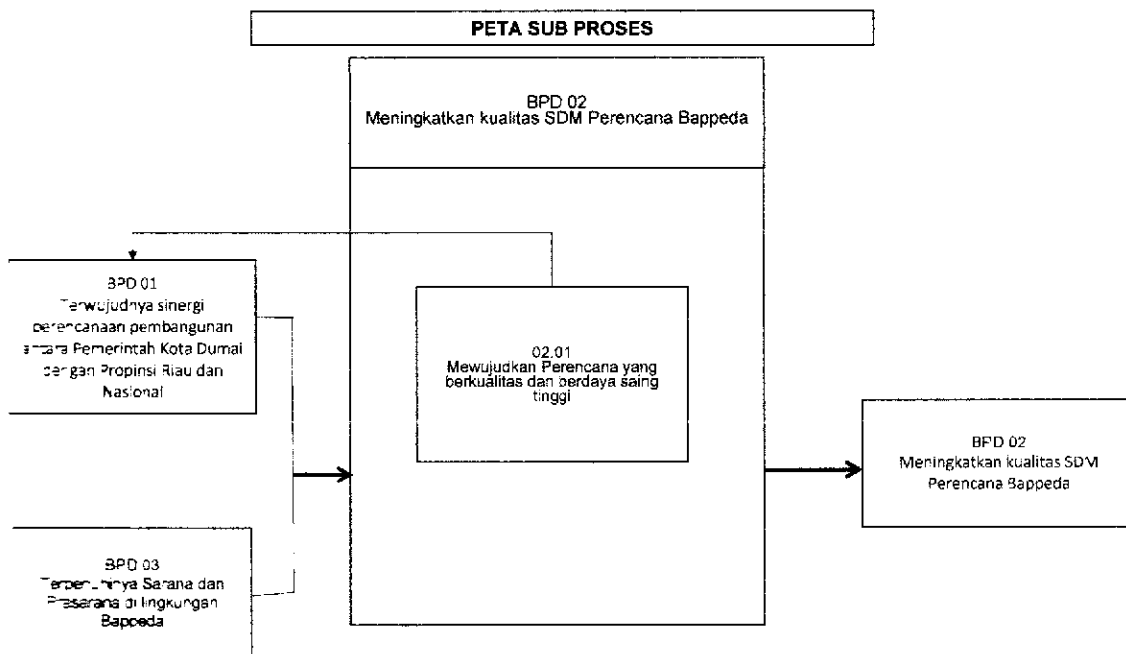
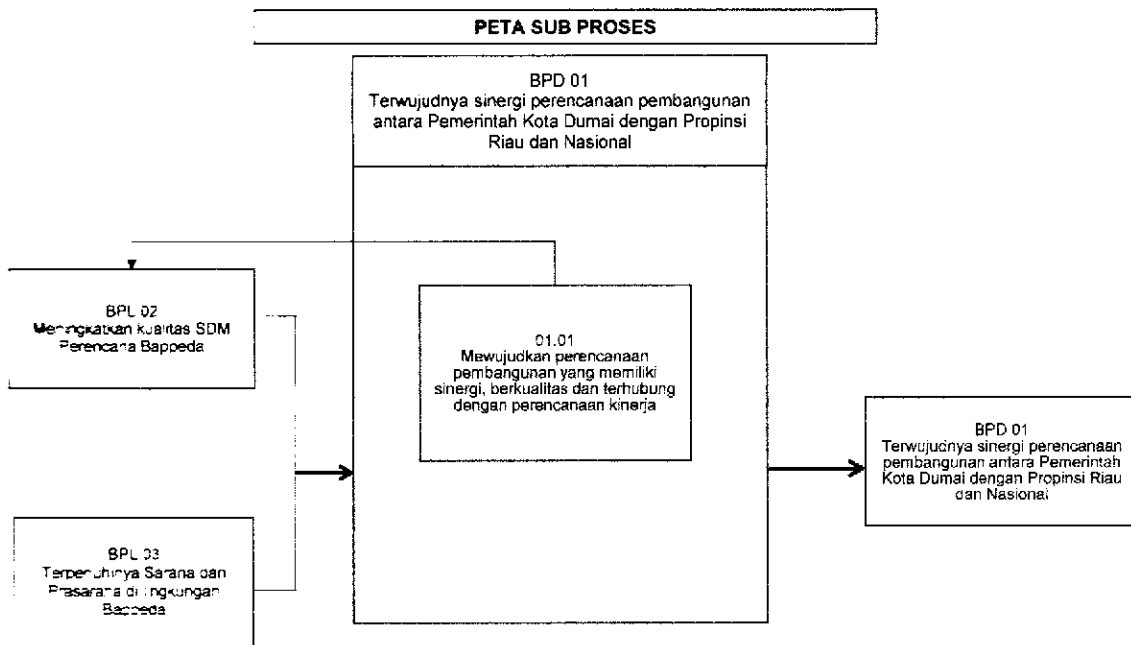
TABEL PROSES BISNIS PADA PETA PROSES BISNIS

PROSES BISNIS			
1	2	3	4
No	Proses /SASARAN	Jenis Proses	Kode
1	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Utama	BPD 01
2	Meningkatkan kualitas SDM Perencana Bappeda	Lainnya	BPD 02
3	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di lingkungan Bappeda	Pendukung	BPD 03

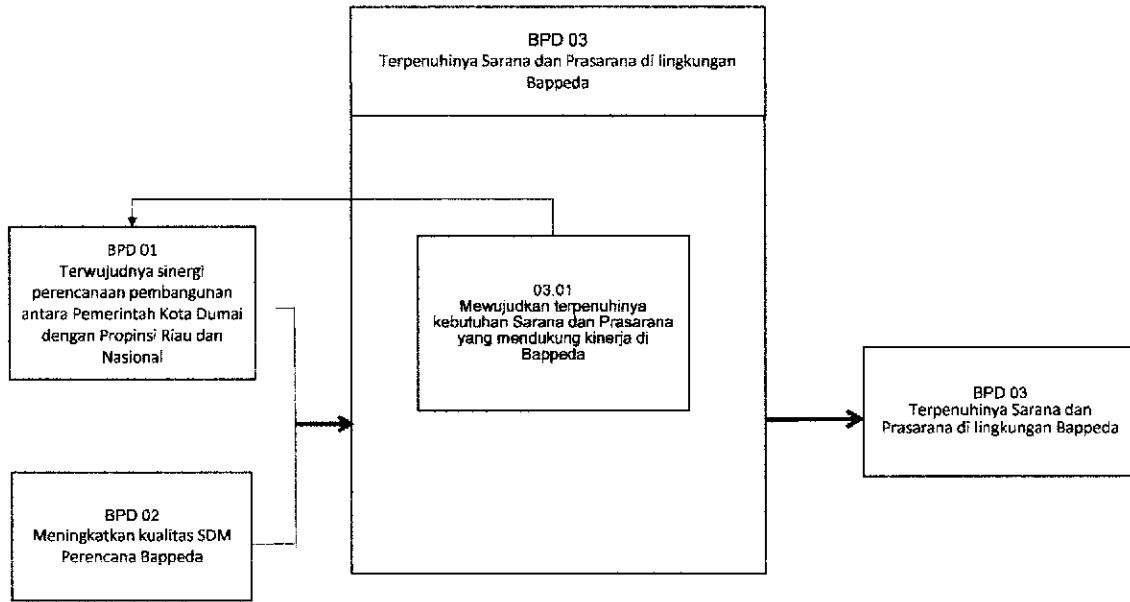
PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TABEL PETA SUB PROSES PADA PETA PROSES BISNIS

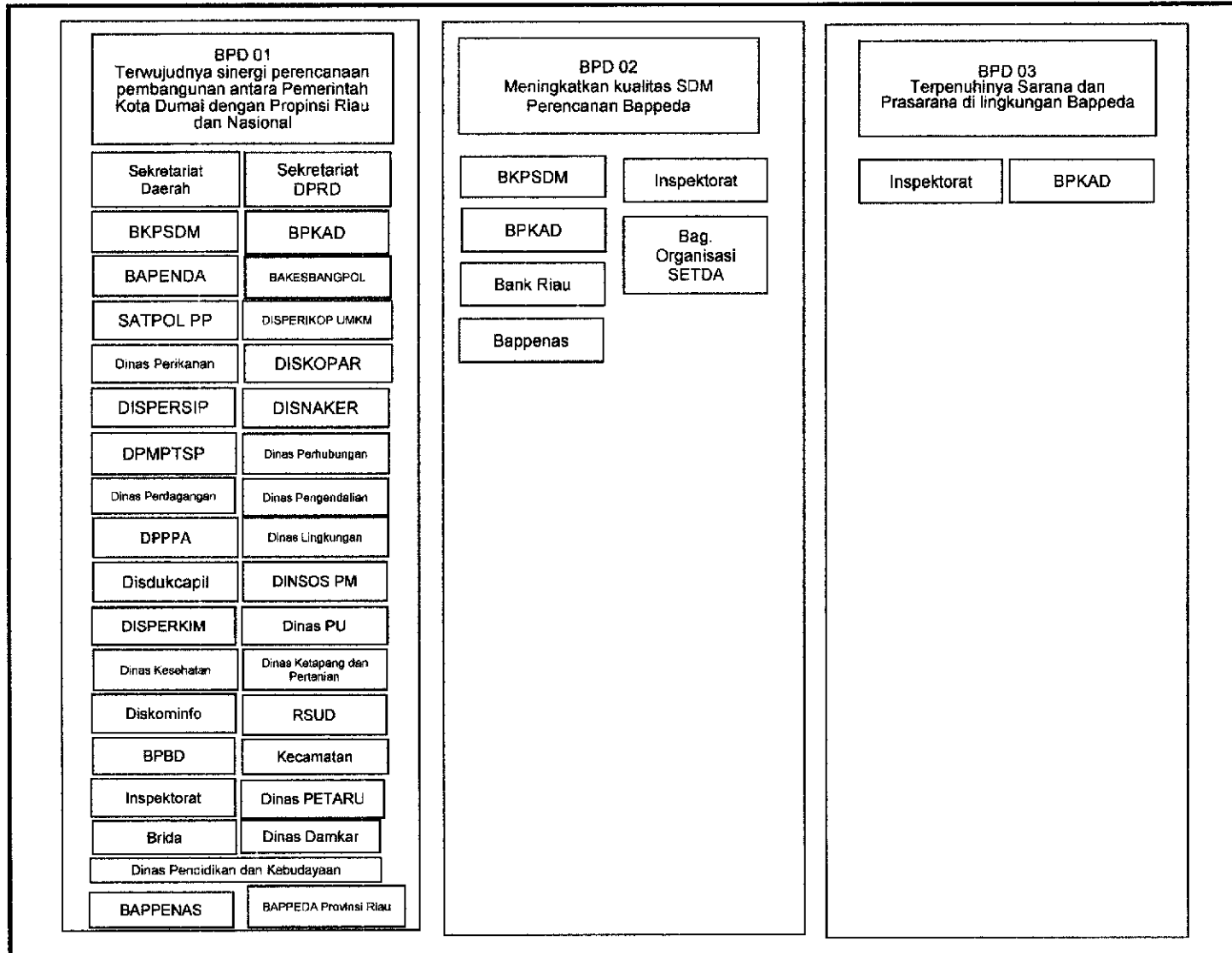


PETA SUB PROSES



TABEL PETA RELASI PADA PETA PROSES BISNIS

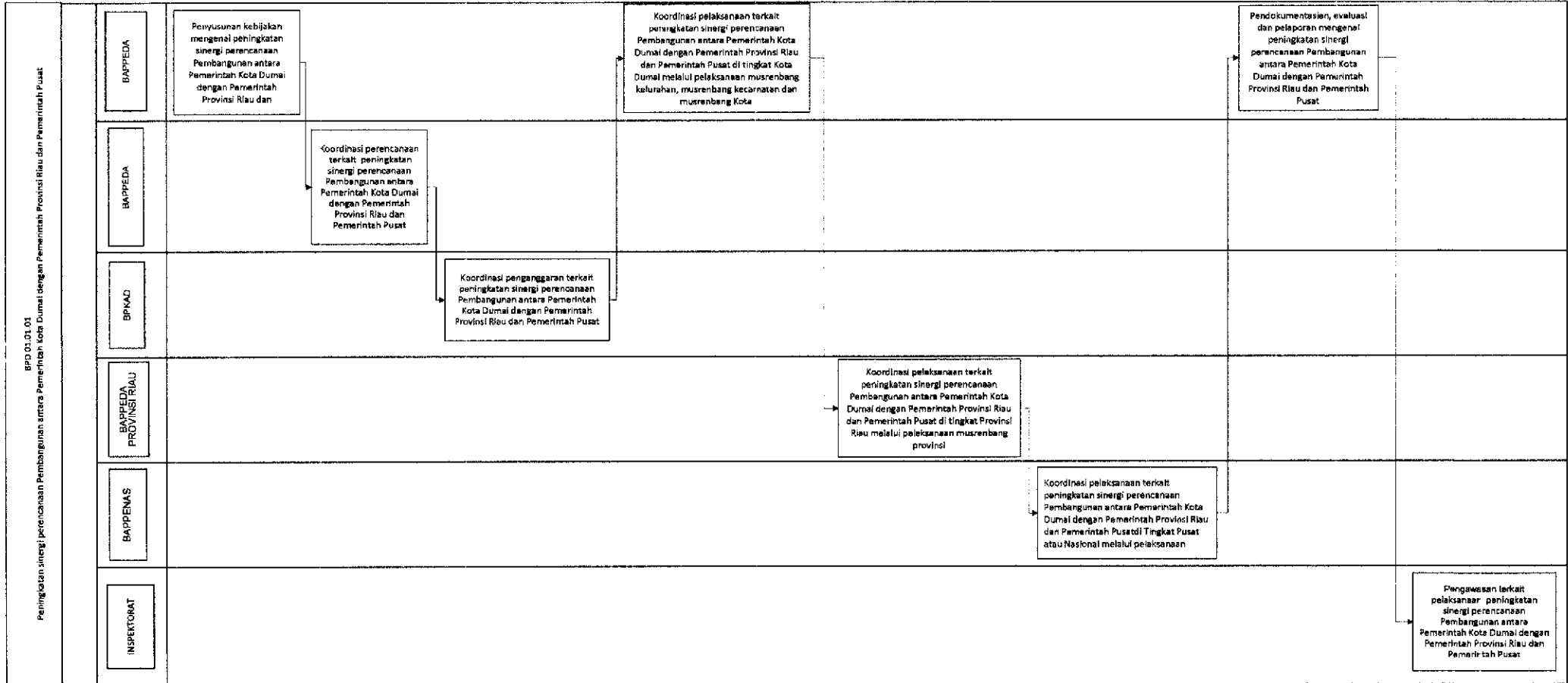
PETA RELASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 01.01.01

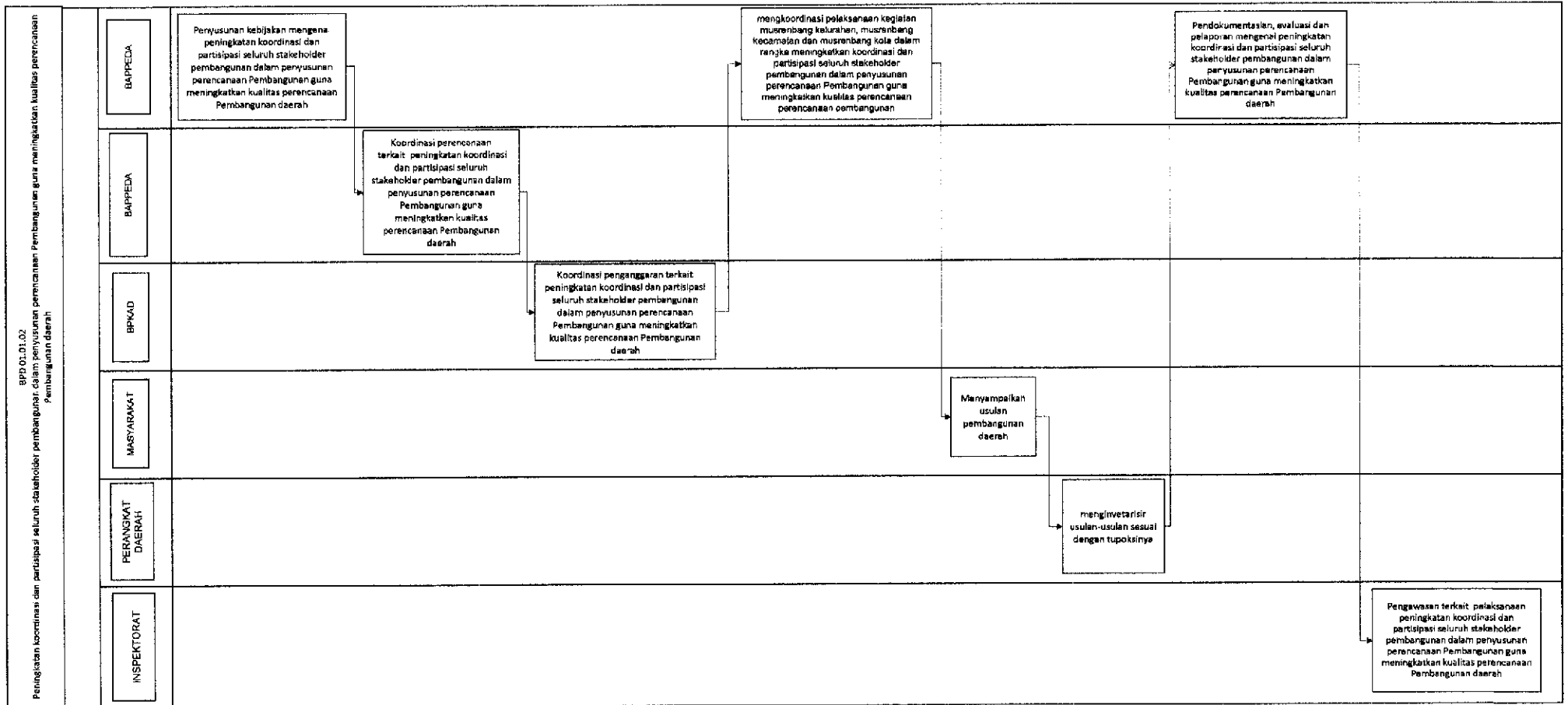
Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 01.01.02

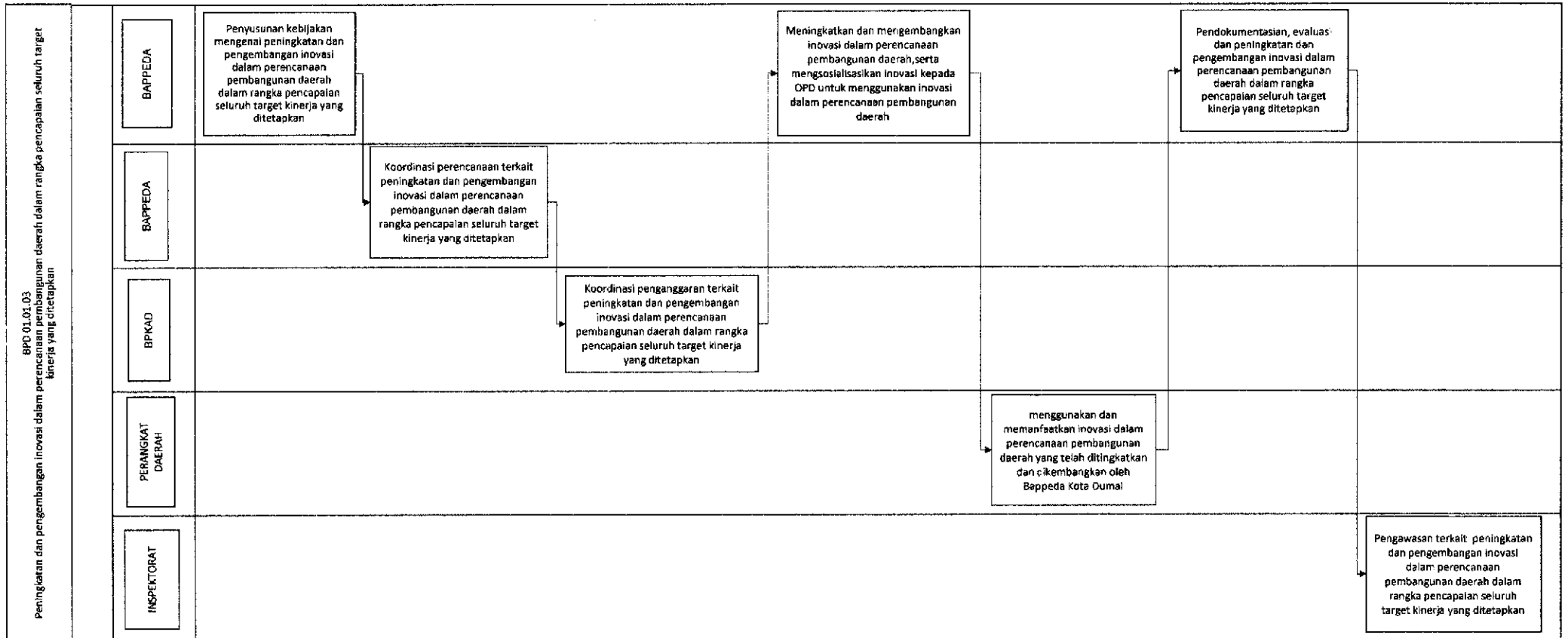
Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan guna meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 01.01.03

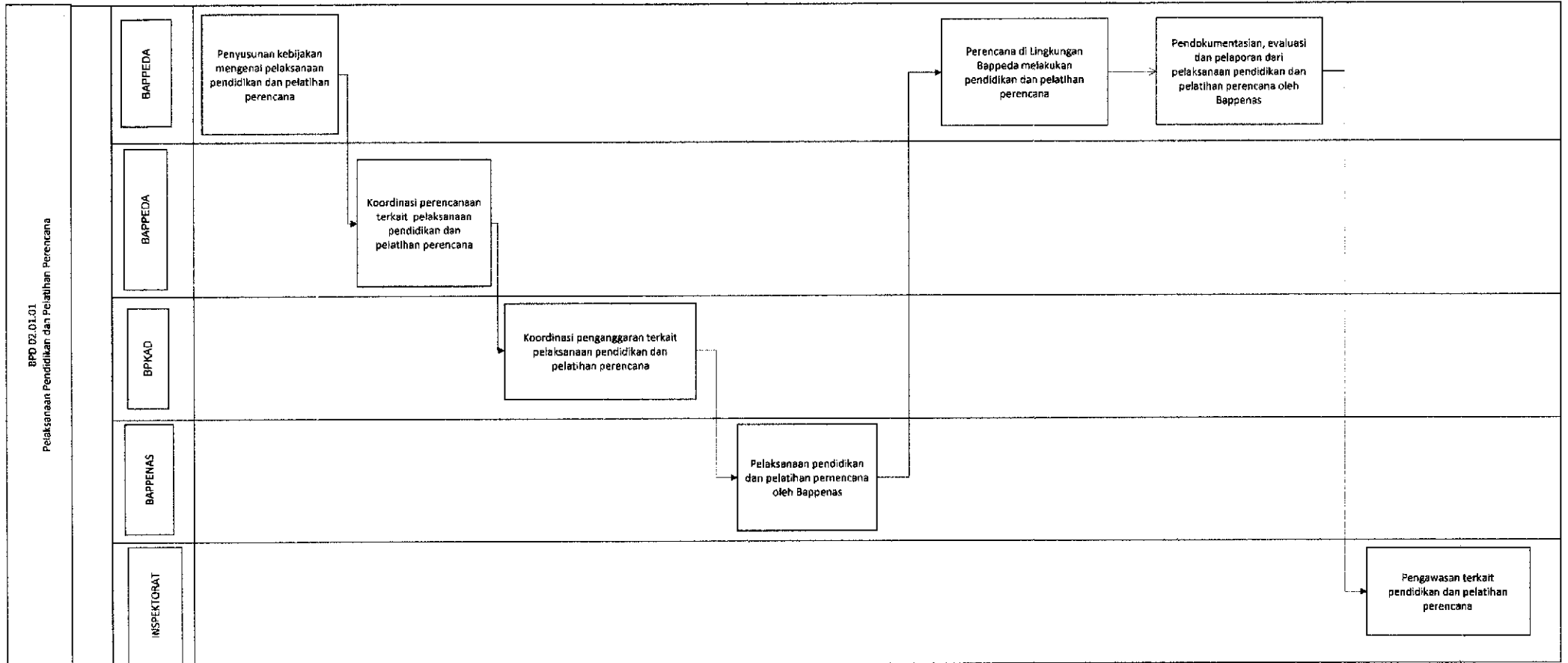
Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang ditetapkan



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 02.01.01

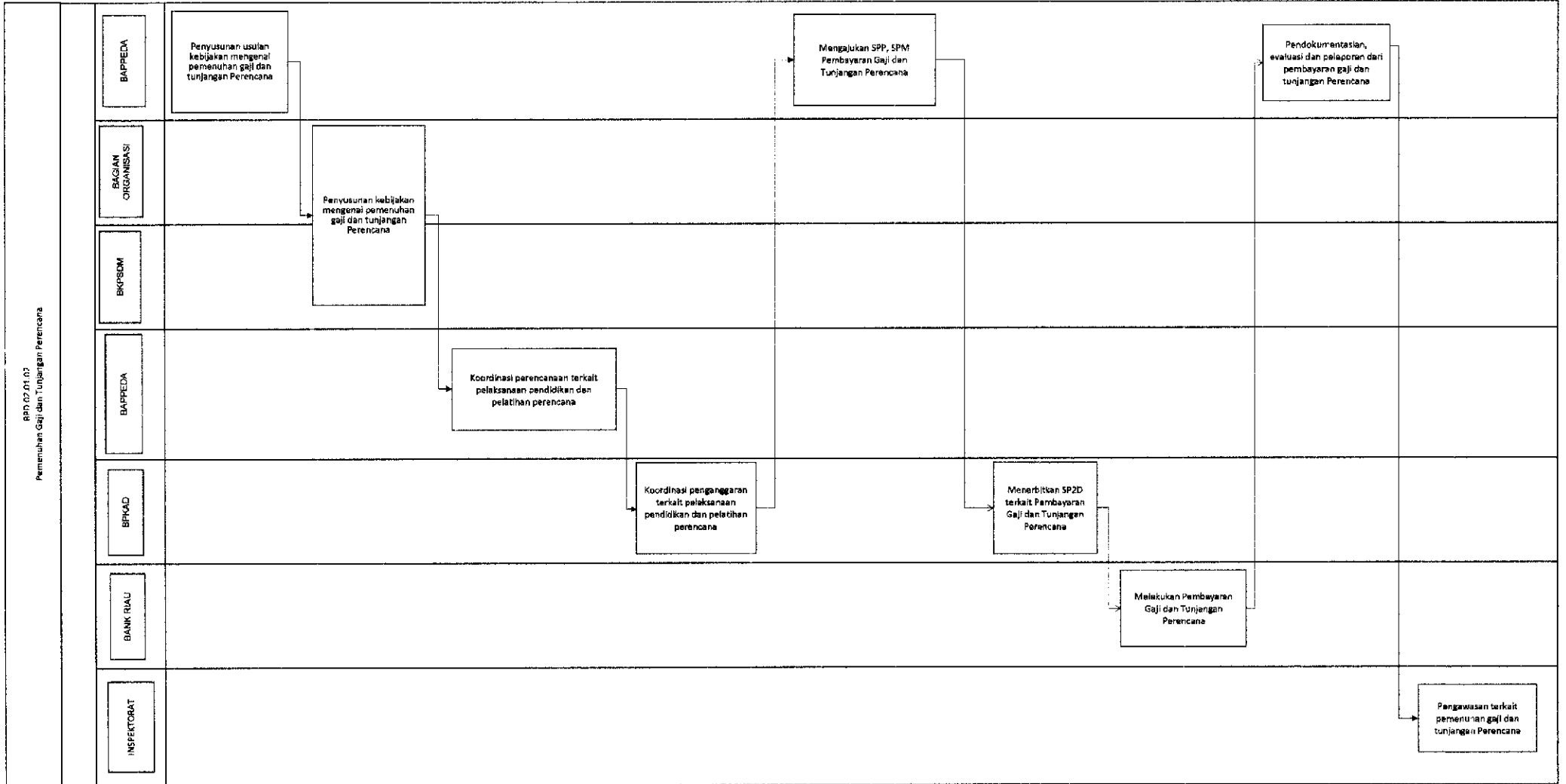
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 02.01.02

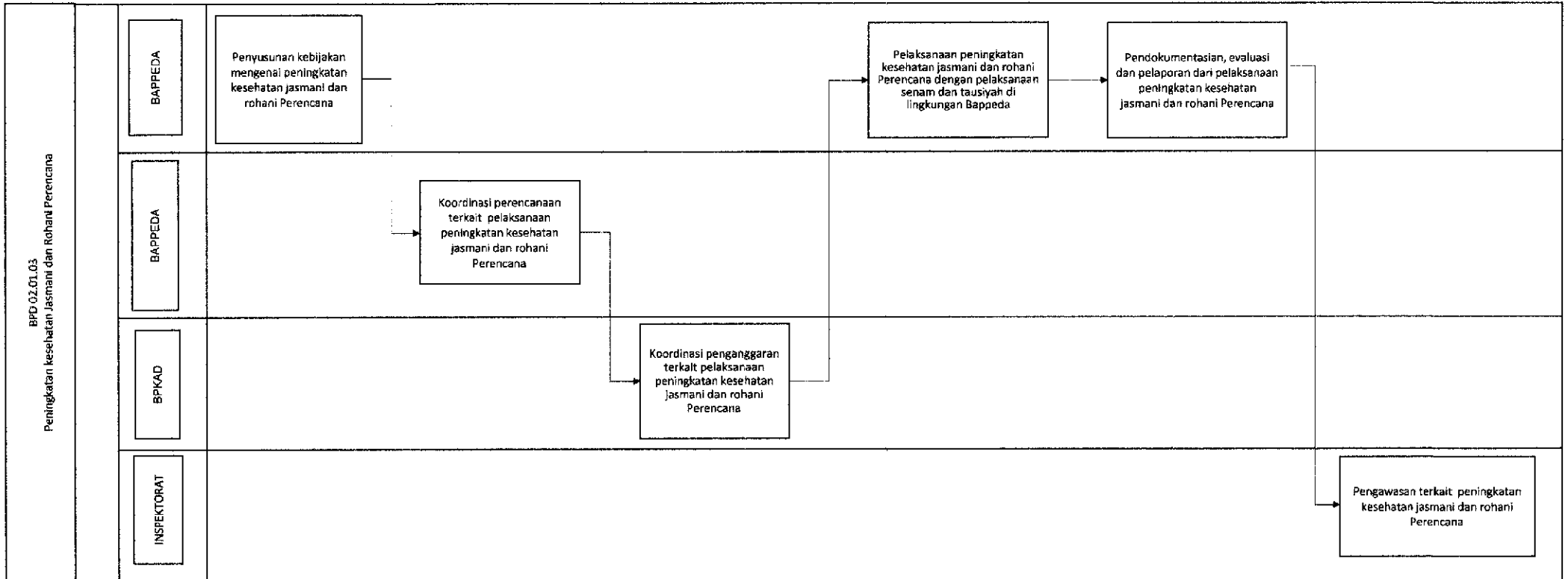
Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Perencana



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 02.01.03

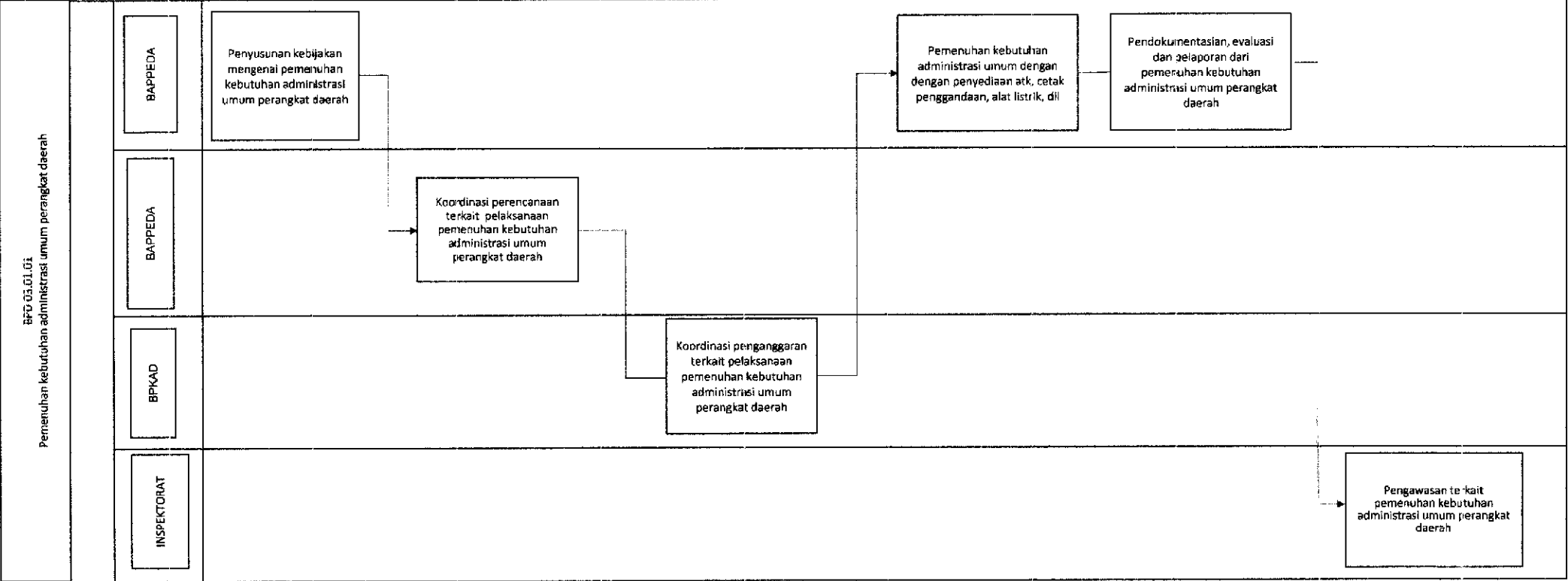
Peningkatan kesehatan Jasmani dan Rohani Perencana



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 03.01.01

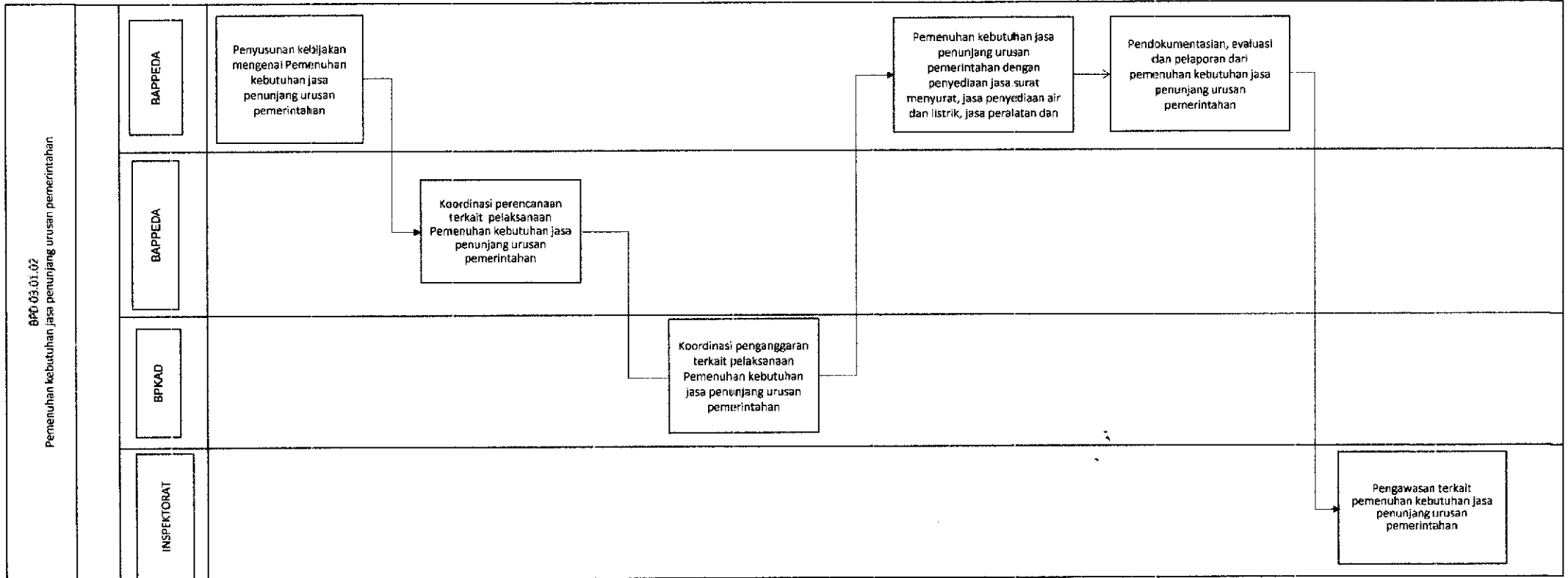
Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 03.01.02

Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan



PETA LINTAS FUNGSI

BPD 03.01.03

Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah

